

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintahan Desa di Kec. Kunjang, Kab. Kediri)

Natasya Firda Nuzulla^{1*}, Maslichah², Arista Fauzi Kartika Sari³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email : natasyanuzulla27@gmail.com

ABSTRACT

Village financial management accountability is one of the important things in village government institutions in order to manage village finances professionally and responsibly, transparently, and have effectiveness and efficiency in presenting their financial reports. The purpose of this study was to determine how the presentation of financial statements, accessibility of financial statements, and control systems affect the accountability of village financial management in village government institutions in Kunjang District, Kediri Regency. The population in this study were all employees of village government offices in Kunjang District. The sampling technique in this study was purposive sampling with the criteria used only included the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer resulting in 30 respondents. Primary data was obtained by distributing questionnaires to respondents. This study uses multiple linear regression analysis which is processed using the SPSS application. Based on the results of the research conducted, it shows that the presentation of financial statements and the internal control system have a significant positive effect on the accountability of village financial management in village government institutions in Kunjang Subdistrict, while the accessibility of financial statements has no influence on the accountability of village financial management.

Keywords: *Presentation of financial statements, accessibility of financial statements, internal control system, village financial management accountability.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut teori pemerintahan modern, desentralisasi pemerintahan diperlukan untuk pemerintah menjadi lebih dekat dengan rakyat. Dengan pemerintahan yang lebih dekat kepada rakyat, layanan akan lebih cepat, murah, hemat, kreatif, responsif, dan produktif. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah diminta untuk menerapkan desentralisasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemda, serta UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Tujuan dari otonomi daerah yakni meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang mengenai Desa, yang memungkinkan desa secara mandiri dalam mengelola sumber daya desanya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan mutu hidup dan kemakmuran masyarakatnya. Menurut UU No.6, Pasal 93 ayat 1, dalam mengelola keuangan desa terdapat beberapa proses yakni, (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) usaha, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban. Dana Desa yang disalurkan kepada Pemerintahan Desa melalui APBN dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau Kota, digunakan untuk membangun pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membangun komunitas, dan meningkatkan kemampuan masyarakat.

Dikutip dari *DataIndonesia.id* pada tahun 2023, seluruh desa di Indonesia menerima sejumlah alokasi dana desa sekitar Rp 70 triliun, dimana pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut (Sadya. 2023. *DataIndonesia.id*, 10

Desember 2024). Dengan adanya SDM di desa, tingkat transparansi dan akuntabilitas dapat dipengaruhi secara langsung. Dimana hal ini akan memicu munculnya sebuah kecurangan yang merupakan unsur utama terjadinya perbuatan korupsi. Korupsi akan dapat dicegah apabila pemerintahan dapat meningkatkan serta membangun pengendalian internal dengan baik dan menyeluruh (Ramon, 2014).

Dikutip dari Kompas Pedia Pemerintah desa bertanggung jawab langsung atas dana APBN. Dengan prosedur mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Pusat (RKUP) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang kemudian dialirkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Pemerintah desa mengelola dana untuk pembangunan setelah menerimanya. Prinsip-prinsip pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip hukum sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Buku Saku Dana Desa oleh Kemenkeu. Namun, bukti lapangan menunjukkan bahwa ada kasus penggelapan dana yang melibatkan sejumlah kepala desa.

Sebagai contoh, enam Kades di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, didakwa pada tahun 2016. Mereka diduga melakukan korupsi yang berkaitan dengan penyelewengan dana desa pada tahun 2015. Kasus ini juga melibatkan sejumlah perangkat desa: SR, Bendahara Desa Kilimuri; SK, Bendahara Desa Undur; ARW, Kepala Desa Kian Darat; MSK, Kepala Desa Kilwaru; AM, Kepala Desa Miran Manaban; dan IGK, Kepala Desa Rurat. Enam Kades tersebut adalah kepala desa MAKR, Kilimuri, SFG, dan Undur. Dalam kasus ini, sembilan orang diidentifikasi sebagai tersangka. Dalam kasus ini didapati adanya penataan dalam menyalurkan dana desa yang tidak searah terhadap proses yang ada.

Selain itu, pada tahun 2017, ada kasus penyalahgunaan dana desa di Papua, yang dimana masyarakat desa di Kabupaten Yahukimo, Papua tidak mengalami pembangunan di desanya dengan dana desa. Sejumlah 70 Kades di Kabupaten Yahukimo, Papua, diperkirakan melakukan penyelewengan dana desa berdasarkan hasil laporan warga serta pegawai terkait yang dikonfirmasi oleh Bupati Yahukimo Abock Busup. Kasus baru ini meningkatkan daftar kasus penyelewengan dana desa di Papua. Awalnya, PW, mantan Kepala DPMK Kabupaten Tolikara, disebut sebagai tersangka dugaan penyelewengan dana desa tahun 2016. Negara diasumsikan mengalami kerugian sebesar Rp 182,7 miliar.

Pada kasus lain di tahun 2018, koruptor dana desa melakukan penyalahgunaan dana serta penculikan. Dalam kasus rencana pembangunan jalan desa di Desa Noenasi, Kecamatan Miomafo Tengah, NTT, Pratinana Koreh, juga dikenal sebagai Ranti Koreh, diduga memberatkan dana negara sebanyak Rp 445 juta. Namun, tuduhan terhadapnya bertambah setelah dia menculik seorang anak berusia empat tahun bernama Richard Mantolas selama persidangan, yang merupakan anak dari Kundrat Mantolas, jaksa penyidik dalam kasusnya. Penculikan terjadi pada 28 Mei 2018. Richard ditemukan oleh polisi dalam keadaan selamat pada tanggal 30 Mei 2018 setelah melakukan pencarian.

Ketidakmampuan desa dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pusat menyebabkan banyak penyelewengan dana desa. Selain itu, banyak kasus penyalahgunaan dana terkait dana desa untuk kepentingan pribadi dengan disengaja. Akibatnya, penyaluran dana desa harus dipantau secara ketat untuk menghindari kerugian negara (Gitiyarko.2020. kompaspedia.kompas.id, 10 Desember 2024).

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan suatu instansi dimana pihak yang memiliki kepentingan wajib bertanggung jawab mengenai apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan, sedangkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ialah suatu langkah dalam mempertanggungjawabkan mengenai penyelenggaraan dana desa yang dilaksanakan sesuai prosedur, kebijakan, serta konstitusi dan prinsip yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa. Yang dimana berhasil atau tidaknya suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya (Halim, 2007).

Akuntabilitas itu harus objektif, transparansi, jujur, inovatif serta memiliki inspirasi dalam merubah manajemen lembaga pemerintah, meningkatkan metode pengukuran kinerja serta pembuatan laporan yang akuntabel. Pelaporan keuangan pemerintahan didasarkan pada akuntabilitas, yang pada dasarnya masyarakat berhak mengetahui dan menerima kejelasan tentang bagaimana sumber daya dikumpulkan dan digunakan. Cara pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintahan di NKRI ini diatur PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (R. Indonesia, 2010).

Melakukan reformasi penyajian laporan keuangan adalah salah satu syarat untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik. Dengan meningkatnya tuntutan terhadap penerapan akuntabilitas publik, ada kemungkinan bahwa pemerintah harus menyediakan dan menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik sebagai bukti bahwa mereka bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2009:159). Apabila penyajian laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan transparansi, maka akan menghasilkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Dalam penelitian sebelumnya, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah variabel aksesibilitas laporan keuangan. Dimana aksesibilitas laporan keuangan adalah suatu kemudahan serta ketersediaan informasi keuangan suatu entitas agar dapat diakses dan dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mulayana, 2006). Aksesibilitas laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat secara transparan dan jujur, karena aksesibilitas laporan keuangan itu sangat penting, dimana laporan keuangan adalah suatu sarana utama untuk mengomunikasikan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan memberikan informasi laporan keuangan ke seluruh pihak pengguna yang berkepentingan, seperti stakeholder (Mustofa, 2012).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ialah sistem pengendalian internal. Dimana pengendalian intern ialah suatu sistem operasional yang terdapat dalam organisasi untuk menjaga proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Menurut Krismiaji (2010:218), pengendalian intern adalah suatu prosedur yang digunakan dalam mengarahkan, memantau, dan menguji sumber daya suatu organisasi agar mendapatkan informasi yang teliti dan dapat diandalkan. Pengendalian intern yang baik serta komprehensif adalah salah satu upaya dan peran penting dalam pencegahan dan deteksi penggelapan atau korupsi (Ramon dkk, 2014:6). Sistem pengendalian intern disini dirancang agar dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan desa dikelola dengan baik, sesuai dengan norma, aturan, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (Hardiningsih et al., 2019).

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan adanya inkonsistensi hasil antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian ulang untuk mendapatkan data terbaru dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini masih tergolong penelitian yang jarang ditemui atau masih tergolong langka karena fokus dalam penelitian ini ialah Pemdes. Oleh sebab itu, hanya sebagian kecil dalam penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, seperti Wardana (2016) dan Muhammad (2018). Ada beberapa penelitian yang memiliki judul hampir serupa, namun topik dan studi kasusnya lebih berkaitan dengan kegiatan pemerintahan daerah (OPD).

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991) adalah teori yang mendasari penelitian ini. Teori ini menjelaskan tentang situasi di mana manajemen termotivasi oleh hasil utama untuk kepentingan organisasi daripada tujuan individu. Ada hubungan yang erat antara kepuasan pelanggan terhadap keberhasilan organisasi, menurut teori tersebut. Keberhasilan

organisasi digambarkan dengan bagaimana masyarakat dan pemimpinnya dapat memaksimalkan manfaatnya. Pada akhirnya, hal ini akan memaksimalkan kepentingan setiap orang dalam organisasi tersebut.

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara), akuntabilitas merupakan suatu keharusan dalam memberikan tanggung jawab atau menjawab serta menjelaskan kemampuan dalam kegiatan kepengurusan yang kolektif pada badan hukum atau organisasi terhadap pihak-pihak yang berhak dan berwenang meminta keterangan atau tanggung jawab.

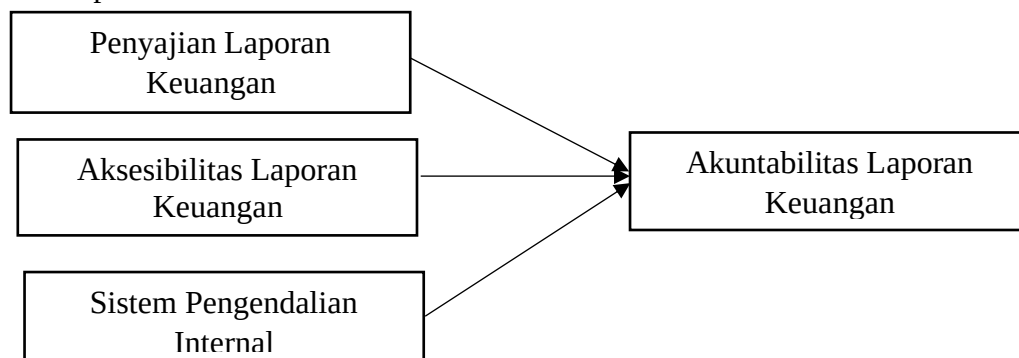
IAI-KASP (2015) mendefinisikan bahwa pembuatan laporan keuangan ialah tahapan terakhir dalam siklus akuntansi. Informasi keuangan didapatkan dari semua tahap yang dilakukan, sehingga terciptalah neraca lajur. Saat menyusun laporan keuangan, informasi yang dilakukan didasarkan pada neraca lajur yang akan dipakai sebagai dasarnya.

Mulyana (2006), menyampaikan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan suatu fasilitas semua masyarakat dalam mendapatkan informasi laporan keuangan. Rochman (2009), juga menyatakan bahwa aksesibilitas dalam sudut pandang perencanaan wilayah adalah adanya hubungan dan kemudahan pergerakan seseorang serta kendaraan yang berada di suatu tempat untuk ke tempat lain dengan aman, nyaman, dan dengan kecepatan yang wajar.

PP No 60 Tahun 2008 yang mengatur terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa pengendalian intern pemerintahan adalah suatu proses terpadu yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam memberikan harapan yang layak atas tercapainya tujuan organisasi dengan memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, operasional dan administrasi pemerintahan, keamanan aset, serta ketaatan terhadap konstitusi yang ada.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori yang ada, bisa digambarkan kerangka konseptual berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1 : Penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- H2 : Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- H3 : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- H4 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah menggunakan metode survei atau kuesioner angket dengan menyebarkan kuesioner kepada

seluruh pegawai yang berada dalam kantor desa di Kecamatan Kunjang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berfokus pada seluruh pegawai pemerintahan desa dengan kriteria sebagai Kades, Sekdes, serta Bagian Keuangan (Bendahara) desa yang berjumlah 36 aparatur desa. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	30	4	5	4,57	,386
X2	30	3	5	4,22	,498
X3	30	4	5	4,53	,387
Y	30	3	4	3,80	,368
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Pada tabel 4.4, dijelaskan bahwa data yang diperoleh berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang berjumlah 30 ialah hasil statistik deskriptif untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) mempunyai nilai minimum sebesar 4.00, nilai maximum penyajian laporan keuangan sebesar 5.00, dengan nilai rata-ratanya sebesar 4.57, serta nilai standar deviasi penyajian laporan keuangan tersebut sebesar 0.386.

Hasil statistik deskriptif untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) mempunyai nilai minimal sebanyak 3.00, dan nilai maksimal aksesibilitas laporan keuangan sebanyak 5.00, dengan nilai mean sebanyak 4.53, serta nilai std.deviation aksesibilitas laporan keuangan sebanyak 0.498.

Hasil statistik deskriptif untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) mempunyai nilai minimal sebanyak 4.00, dan nilai maksimal sistem pengendalian internal sebanyak 5.00, dengan nilai mean sebanyak 4.53, serta nilai std.deviation untuk sistem pengendalian sebanyak 0.387.

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 3.00, dan nilai maximum akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 4.00, dengan nilai rata-rata sebesar 3.80, serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 0.368.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Dari hasil uji validitas yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas pada variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) terdiri dari 7 pertanyaan. Dari tujuh pertanyaan ini memiliki nilai rhitung yang berkisar antara 0.595 hingga 0.896, yang lebih besar daripada rtabel 0,3610, maka instrumen untuk variabel X1 dinyatakan valid.

Pada variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) terdiri dari 3 pertanyaan. Dari tiga pertanyaan ini memiliki nilai rhitung yang berkisar antara 0.738 hingga 0.908, yang lebih besar daripada rtabel 0.3610, maka instrumen untuk variabel X2 dinyatakan valid.

Pada variabel Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 8 pertanyaan. Dari tiga pertanyaan ini memiliki nilai rhitung yang berkisar antara 0.421 hingga 0.923, yang lebih besar daripada rtabel 0.3610, maka instrumen untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) dinyatakan valid.

Pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) terdiri dari 4 pertanyaan. Dari empat pertanyaan ini memiliki nilai rhitung yang berkisar antara 0.516 hingga 0.918, yang

lebih besar daripada rtabel 0.3610, maka instrumen variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items	Keterangan
X1	,903	7	Reliabel
X2	,782	3	Reliabel
X3	,926	8	Reliabel
Y	,733	4	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan data tabel 4.6, dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach's Alpha dari variabel X1 adalah sebesar 0,903, variabel X2 sebesar 0.782, variabel X3 sebesar 0.926, dan variabel Y sebesar 0.733, yang dimana semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,6 sehingga seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		X1	X2	X3	Y
N		30	30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	32,00	12,67	36,23	15,20	15,36
	2,704	1,570	3,093	1,163	1,131
Most Extreme Differences	,178	,203	,216	,149	,160
	,164	,203	,181	,109	,106
	-,178	-,107	-,216	-,149	-,160
Kolmogorov-Smirnov Z		,973	1,113	1,184	,816
Asymp. Sig. (2-tailed)		,300	,168	,121	,519
Test distribution is Normal.					

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Hasil uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi dengan normal, apabila nilai residual dengan model regresi ini mempunyai nilai signifikan > 0,05. Berdasarkan tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y memiliki nilai Asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen dalam penelitian ini bisa dikatakan terdistribusi dengan normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penyajian Laporan Keuangan	,497	2,011
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,814	1,228
	Sistem Pengendalian Internal	,507	1,973

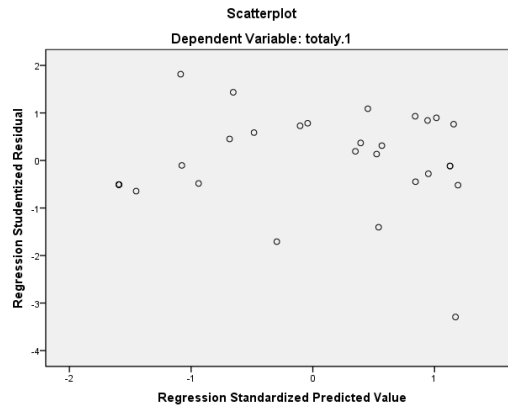
a. Dependent Variable: Y_Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas, dapat ditunjukkan bahwa variabel independen tidak mempunyai hubungan multikolinearitas terhadap variabel dependen, karena nilai *tolerance* untuk variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem

pengendalian internal > 0,10 dan untuk nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas untuk seluruh variabel yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot

Pada Gambar 4.1, diketahui bahwa tidak terlihat pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas maupun dibawah angka pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan ketentuan yang diambil, bahwa tidak timbul adanya heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,791	1,542		1,810	,082
	Penyajian Laporan Keuangan	,250	,061	,581	4,060	,000
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	-,066	,083	-,089	-,800	,431
	Sistem Pengendalian Internal	,145	,053	,386	2,725	,011

a. Dependent Variable: Y_Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Pada tabel 4.9, didapatkan hasil persamaan regresi linear berganda berikut ini.

$$\begin{aligned}
 Y &= a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e \\
 Y &= 2,791 + 0,250X_1 + (-0,66X_2) + 0,145X_3 + e \\
 &= \text{sig.}0,083 + \text{sig.}0,000 + \text{sig.}0,431 + \text{sig.}0,011 + e
 \end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika variabel terikat (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa) bernilai 2,791 dengan nilai signifikan 0,083, maka variabel penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, serta Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai konstan.
2. Jika variabel penyajian laporan keuangan (X1) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,250, artinya jika variabel penyajian laporan keuangan meningkat satu dalam satuan, maka variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pun juga ikut meningkat sebesar 0,250.
3. Jika variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,066, maksudnya jika variabel aksesibilitas keuangan bertambah satu dalam satuan, maka variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga ikut bertambah sejumlah 0,066.

4. Jika variabel sistem pengendalian internal (X3) memiliki nilai koefisien regresi sejumlah 0,145, maksudnya adalah jika variabel sistem pengendalian intern bertambah satu dalam satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan bertambah sejumlah 0,145.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28,847	3	9,616	24,112	,000 ^a
	Residual	10,369	26	,399		
	Total	39,216	29			
a. Predictors: (Constant), X3_Sistem Pengendalian Internal, X2_Aksesibilitas Laporan Keuangan, X1_Penyajian Laporan Keuangan						
b. Dependent Variable: Y_Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa						

Sumber : Hasil Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, di dapatkan F hitung sebesar 28,847 dengan nilai signifikan F <,000. Karena nilai signifikan F 0,000 < 0,05, maka H0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara simultan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tabel 4.11 Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary ^b					
Model		R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	1	,858 ^a	,736	,705	,632
a. Predictors: (Constant), X3_Sistem Pengendalian Internal, X2_Aksesibilitas Laporan Keuangan, X1_Penyajian Laporan Keuangan					
b. Dependent Variable: Y_Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa					

Sumber : Hasil Output SPSS, 2024

Pada tabel 4.11, ditunjukkan bahwa R2 memiliki jumlah total persentase variansi pada variabel dependen yang ditafsirkan oleh variabel dependen yaitu sebesar 0,705 atau 70,5%. Hal ini menjelaskan bahwa besarnya variabel bebas terhadap variabel dependen ialah sebesar 70,5%, sedangkan 29,5%-nya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.12 Hasil Uji Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,791	1,542		1,810	,082
	Penyajian Laporan Keuangan	,250	,061	,581	4,060	,000
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	-,066	,083	-,089	-,800	,431
	Sistem Pengendalian Internal	,145	,053	,386	2,725	,011
a. Dependent Variable: Y_Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa						

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dijelaskan bahwa variabel X1, dan X3 berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Sedangkan untuk variabel X2 tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Dapat dilihat dari hasil uji parsial (uji t) variabel penyajian laporan keuangan mempunyai hasil nilai t sebesar 4.060 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa $0,000 < 0,05$ H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang dapat diartikan bahwa variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis kedua atau H_2 diterima.

Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin baik pemerintahan desa dalam menyajikan laporan keuangan desa, maka akan menjadikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin baik juga nantinya. Dengan menyajikan laporan keuangan desa yang semakin baik tentunya akan memberikan kejelasan dalam pelaporan keuangan pemerintah desa, dikarenakan seluruh transaksi yang berlangsung harus atas dasar peraturan yang berlaku serta disajikan secara integral sesuai dengan kebenaran sehingga laporan keuangan akan terlihat transparan agar mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik. Ketika pengelolaan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan dengan efektif, maka akan bisa dijadikan sebagai acuan dalam menyusun anggaran tahunan pada tahun berikutnya, bisa juga untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hehanusa (2015), terkait tentang pengaruh penyajian laporan keuangan desa, yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Wardana (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dapat dilihat pada hasil uji parsial (uji t) variabel aksesibilitas laporan keuangan mempunyai hasil nilai t sebesar -800 dengan nilai signifikansi sebesar 0,431. Maka dapat disimpulkan bahwa $0,431 > 0,05$ H_0 diterima dan H_3 ditolak, sehingga untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dalam menyajikan laporan keuangan desa kepada para pihak yang berkepentingan masih kurang. Apabila suatu organisasi bisa membuat laporan keuangan yang mudah di akses bagi para pihak yang bersangkutan, akan memberikan pengawasan yang teratur terhadap akuntabilitas pelaksanaan aset desa dan pengelola strategi keuangan pemerintah dengan baik, maka diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian menurut Nitasari (2018) yang menjelaskan bahwa aksesibilitas keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dapat dilihat dari hasil uji parsial (uji t) variabel sistem pengendalian intern mempunyai hasil nilai sejumlah 2,725 dengan nilai signifikansi sejumlah 0,011. Maka dapat disimpulkan bahwa $0,011 < 0,05$ H_0 ditolak dan H_4 diterima, yang artinya sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil ini menjelaskan bahwa seberapa baik sistem pengendalian intern dan implementasinya pada pemerintahan desa, maka akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

pada pemerintahan desa tersebut. Penerapan pengendalian internal yang memuaskan akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan. Meningkatkan kepercayaan dalam mencapai tujuan organisasi melalui operasional yang efektif dan efisien. Terjadinya pengendalian internal yang efektif dan nyata akan menghasilkan laporan keuangan yang berguna dan bisa dipercaya, serta bisa mengamankan aset milik desa, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang sesuai dengan konstitusi yang ada.

Sistem pengendalian internal memiliki tujuan dalam memberi kepercayaan yang cukup terhadap kemampuan dalam penggunaan pencapaian tujuan pengendalian pemerintahan negara, ketaatan terhadap pelaporan keuangan, serta mengamankan aset desa sesuai dengan perundang-undangan (Hasibuan, 2018). Sehingga bisa disimpulkan bahwa ketika sistem pengendalian intern ini dijalankan dengan sangat baik, maka akuntabilitas laporan keuangan desa juga akan semakin meningkat dengan baik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wardana (2016), yang berpendapat bahwa sistem pengendalian intern juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun secara parsial variabel penyajian laporan keuangan dan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan variabel aksesibilitas laporan keuangan ini tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu, jumlah sampel pada penelitian ini hanya berjumlah 30 responden, tentunya masih sangat kurang dalam memaparkan kondisi sebenarnya. Dalam proses pengambilan data, serta informasi yang didapat dari responden melalui pengisian kuesioner belum menjelaskan mengenai keakuratannya, karena perbedaan pandangan, pemahaman, serta pemikiran yang berbeda-beda setiap responden, dan juga integritas setiap responden dalam mengisi kuesioner. Karena keterbatasan tempat, waktu, dan juga tenaga, maka peneliti hanya melakukan penelitian pada Pemerintahan Desa se Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dengan jumlah populasi 10 desa, sehingga generalisasinya hanya dapat berlaku pada pemerintahan desa tersebut, hasil dari penelitian ini dapat berbeda apabila dilakukan dengan jumlah populasi yang berbeda. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan lain, yakni tidak adanya pro dan kontra dari masyarakat, karena tidak termasuk ke dalam responden penelitian, serta hanya menggunakan empat variabel, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal.

Saran

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, agar keakuratan data lebih baik dalam penelitiannya, dan perlu mempertimbangkan model-model yang berbeda dalam penelitian selanjutnya. Disarankan juga untuk memperluas lokasi penelitian pada penelitian selanjutnya, seperti Pemerintahan Desa se-Kabupaten Kediri. Mengikutsertakan masyarakat untuk menjadi responden dalam penelitian selanjutnya dan memperbanyak jumlah variabel yang bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, seperti determinasi transparansi laporan keuangan, kualitas laporan keuangan, kompetensi pemerintahan, pengawasan fungsional dan partisipasi masyarakat, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA Siti Aliyah Aida Nahar. Jurnal Akuntansi & Auditing.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi.
- Artini, N. L. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hita Akuntansi Dan Keuangan 1(2).
- Fauziyah, M. R. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan keuangan daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6(6).
- Furqani, A. (2010). Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance (studi pada pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep). Veteran" Surabaya.
- Gitiyarko, V. (2020, Januari 28). Kompas Pedia. Diambil kembali dari Kompas.id: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015>
- Hehanussa, S. j. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku.
- Khoirina, A., & Widaryanti, &. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mranggen) . Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi .
- Masyur, M. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Novalia, I. A., & Nahar, A. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri.
- Nuria, R. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Penelitian pada SKPD kabupaten Indragiri Hulu).
- Rahma, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Penelitian pada SKPD kabupaten Indragiri Hulu).
- Ramon, D. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. .
- Randi, T. M. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kampar). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Repitamala, Neni, N., & Syahrul, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

- Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri.
- S. Hasanah, E. N. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia.
- Sabrina, A. A., & Sri, R. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019). Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri.
- Sadya, S. (2023, Maret 22). Ekonomi. Diambil kembali dari DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/anggaran-dana-desa-meningkat-jadi-rp70-triliun-pada-2023>
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. JOMFekom.
- Superdi. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung).
- Tresnawati, S., & Rahayau, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung Tahun 2021) . EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 11(1). .
- Wardana, I. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magelang .
- Akuntan, K. I. (2015). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan.
- Akuntan, K.-I. I. (2015). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan.
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Pemerintahan Desa.
- _____. (2008). Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). .
- _____. (2010). Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- _____. (2014). Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- _____. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____. (2014). Undang-Undang No.6 tentang Desa. .
- _____. (2015). Peraturan Pemerintah No. 22 Pasal 29 tentang Pembagian Dana Desa.